

# PREFERENSI PENANAM MODAL TERHADAP FAKTOR LOKASI INDUSTRI

TELAAH

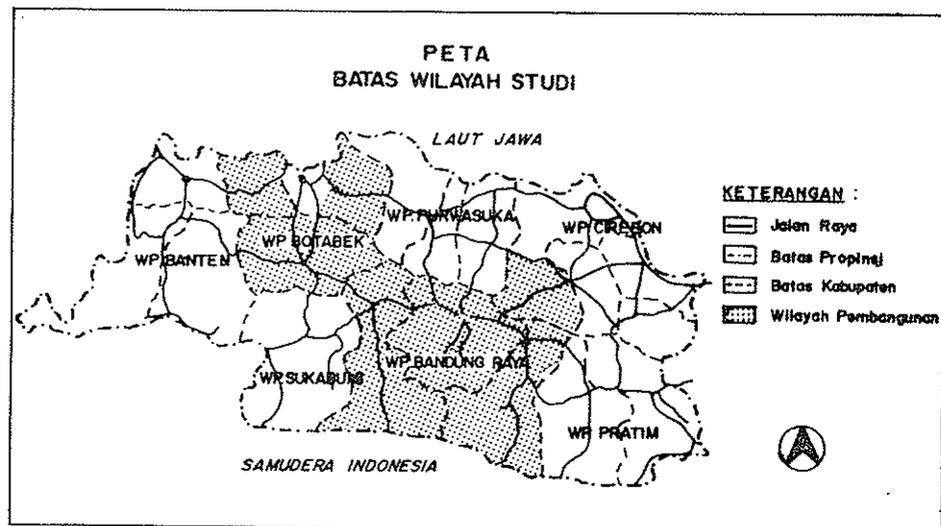
AGUS PERMADI  
Alumni Jurusan Teknik Planologi ITB  
Bekerja pada PT. MIRAZH  
Jakarta

## \*Kasus Studi W P Botabek dan Bandung Raya

PENELAAHAN terhadap kegiatan penanaman modal swasta di Jawa Barat menunjukkan beberapa fenomena menarik. Pertama, Jawa Barat merupakan wilayah (bersama DKI Jakarta) yang memiliki daya tarik lokasi cukup kuat dalam menarik modal swasta.

Pengaruh langsung kegiatan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah peningkatan nilai produksi di berbagai sektor, khususnya industri pengolahan. Selain itu, juga mendorong perkembangan industri/usaha lain yang terkait.

Fenomena kedua, adalah bila ditinjau dari segi pemerataan pembangunan ke semua wilayah, maka sasaran pembangunan melalui penanaman modal belum tercapai secara optimal. Proyek penanaman modal masih terpusat pada dua Wilayah Pembangunan (WP), yaitu WP Botabek dan WP Bandung Raya.



Konsentrasi kegiatan penanaman modal pada dua wilayah tersebut tidak terlepas dari (1) preferensi penanam modal dalam memilih lokasi industri; dan (2) daya tarik lokasi yang dimiliki kedua WP tersebut.

Kajian mengenai preferensi penanam modal dalam proses penentuan lokasi kegiatan industri, khususnya di WP Botabek dan Bandung Raya, dilakukan melalui analisis jawaban para penanam modal (sampel berjumlah 128 perusahaan industri) yang memberikan penilaian maupun persepsinya terhadap sejumlah faktor lokasi (12 faktor lokasi pokok dengan 98 faktor lokasi terinci).

## Penanaman Modal di Jawa Barat

Pada dasarnya masalah penanaman modal berkaitan dengan aspek sektoral dan lokasi (regional). Tinjauan sektoral menyangkut pemilihan sektor kegiatan dalam penanaman modal, seperti pertanian, pertambangan, industri dan sektor lainnya. Dengan demikian, perlu diperhatikan sektor kegiatan yang perlu dan akan dikembangkan serta mengupayakan agar penanam modal tertarik.

Tinjauan lokasi menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah atau wilayah tertentu yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah/wilayah bersangkutan. Masalah yang timbul kemudian adalah kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. Dalam hal ini perlu pengarahannya kegiatan penanaman modal agar lebih tersebar merata guna mengurangi kesenjangan.

Pada hakekatnya masalah penanaman modal ditinjau secara sektoral maupun regional bertujuan akhir sama, yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional dan regional. Menurut teori pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan penanaman modal dan perbaikan teknologi (Sadono Sukirno, 1981:298).

Penduduk dianggap memberi sumbangan positif pada pembangunan karena:

- perkembangannya akan memperluas pasar,
- peningkatan mutu dan kemahiran berdampak positif terhadap pembangunan,
- penduduk menyediakan pengusaha inovatif yang menjadi unsur penting dalam menciptakan pembentukan modal.

Namun demikian beberapa ahli ekonomi mengkhawatirkan, bahwa pertumbuhan penduduk yang terlampaui pesat akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Dalam arti, pembangunan ekonomi akan mengalami kemunduran. Hal ini dapat dipahami, mengingat pertumbuhan penduduk yang terlampaui pesat dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyediaan kesempatan kerja, pemberian pelayanan sosial dan sebagainya.

Selain itu, jika laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk, maka berarti tingkat pertumbuhan ekonomi per-kapita menurun. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk tidak dapat selalu dipandang sebagai faktor yang memberi sumbangan positif (penentu) pada pembangunan ekonomi.

Sebaliknya, kedua faktor lain, yaitu perkembangan penanaman modal dan perbaikan teknologi, akan

selalu memberi sumbangan positif pada pembangunan ekonomi. Kedua faktor tersebut bersifat saling menunjang, dan peningkatan keduanya akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, termasuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan teknologi umumnya hanya dapat dilakukan dengan mengadakan penanaman modal, sehingga pembentukan modal yang ideal adalah jika disertai dengan perbaikan teknologi.

Gambaran tersebut menunjukkan, bahwa penanaman modal merupakan faktor yang berperan penting dalam menentukan kegiatan ekonomi, khususnya menciptakan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal tidak saja akan menghasilkan barang dan jasa konsumsi, tetapi juga barang produksi yang digunakan pada proses selanjutnya.

Untuk kegiatan pembangunan di daerah, penanaman modal dilakukan oleh pihak pemerintah (dana berasal dari APBN dan APBD) dan swasta (PMA, PMDN, kredit perbankan dan swadaya masyarakat).

Kegiatan penanaman modal (pembiayaan pembangunan) regional Jawa Barat selama Pelita I, II dan III terinci pada Tabel 1. Dari segi jumlah modal tertanam, terlihat peningkatan dari Pelita I hingga Pelita III. Namun dari segi peranan swasta malah terjadi penurunan. Demikian pula peran sektor PMA dan PMDN secara keseluruhan cenderung menurun.

Namun demikian, sektor swasta dengan sumbangan lebih dari 60% jelas menunjukkan peranan yang sangat berarti dalam membiayai pembangunan di wilayah ini. Demikian pula sektor PMA dan PMDN yang menyumbang lebih dari sepertiga dari sumber pembiayaan pembangunan.

Dalam lingkup nasional, para penanam modal cenderung memilih DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai lokasi perusahaannya. Sebagai ilustrasi, dalam kurun 1967-1982 misalnya, sekitar 41% proyek PMA dan 21,13% proyek PMDN yang disetujui pemerintah berlokasi di DKI Jakarta, sedangkan Jawa Barat menerima 18,01% proyek PMA dan 22,62% proyek PMDN.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, DKI Jakarta merupakan tempat pertama yang paling diminati para penanam modal asing maupun domestik (24,76% proyek), menyusul Jawa Barat (21,78%), Jawa Timur (11,45%) dan Jawa Tengah (7,56%). Propinsi lainnya, umumnya hanya menerima kurang dari 5% proyek penanaman modal.

Sementara dalam lingkup Jawa Barat, maka WP Botabek dan Bandung Raya (lihat peta) merupakan

lokasi yang paling diminati penanam modal. Sebagai ilustrasi, dalam kurun 1971-1983 misalnya, dari realisasi 158 proyek PMA dan 568 proyek PMDN, sebesar 70,25% proyek PMA dan 53,17% proyek PMDN berlokasi di WP Botabek. WP Botabek menerima 15,19% proyek PMA dan 38,73% proyek PMDN.

Jelas WP Botabek dan WP Bandung Raya terlihat paling dominan dengan lebih dari 90% proyek PMA dan PMDN berlokasi di kedua WP tersebut.

Selain dominan dalam menarik proyek PMA dan PMDN, kedua WP tersebut juga dominan dalam menarik dana PMA dan PMDN. Dalam kurun yang sama misalnya, hampir 99% dana PMA tertarik ke kedua WP tersebut, sementara WP lainnya hanya beroleh sekitar 1% saja. Malah di WP Priangan Timur dan WP Sukabumi tidak terdapat kegiatan PMA.

Demikian pula dalam hal menarik dana PMDN, maka kedua WP tersebut mendapat sekitar 82%. WP lain yang relatif cukup besar menyerap dana PMDN adalah WP Purwasuka (9,86%) dan WP Banten (5,41%).

Jadi jelaslah, dalam kurun waktu tersebut WP Botabek dan Bandung Raya menjadi wilayah pemusatan kegiatan penanaman modal asing maupun domestik. Di satu pihak, hal ini menunjukkan potensi wilayah bersangkutan dalam menarik modal yang tentu menguntungkan bagi perkembangan ekonominya. Namun di pihak lain, konsentrasi tersebut jika dilihat secara makro menunjukkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Konsentrasi kegiatan penanaman modal swasta berarti pula konsentrasi kegiatan industri. Peningkatan kegiatan industri sudah barang tentu akan semakin memperbesar peranan sektor tersebut dalam mendukung perekonomian wilayah.

Pada akhirnya, peningkatan peranan sektor industri meningkatkan pula pendapatan regional maupun pertumbuhan ekonominya.

Namun dibalik itu, pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang tidak berimbang merupakan kondisi yang kurang menguntungkan secara makro. Jika ketimpangan dibiarkan terus berlangsung, maka boleh jadi timbul berbagai persoalan dan kerawanan ekonomi yang pada gilirannya menimbulkan pula persoalan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Usaha promosi untuk menarik modal ke wilayah yang kurang diminati penanam modal memang terus dilancarkan. Berbagai penelitian guna menggali potensi industri juga dilakukan di semua wilayah.

Namun segenap upaya tersebut belum mampu menjawab tuntas permasalahan penanaman modal yang tidak tersebar merata.

### Faktor Penentu Lokasi Industri

Kegiatan industri tentu membutuhkan fasilitas fisik, bangunan, instalasi permesinan, perlengkapan dan faktor lingkungan kerja (Soehardi Sigit, 1982:27-28). Dari seluruh fasilitas fisik, maka "lokasi" merupakan faktor penentu sebelum kegiatan tersebut berlangsung.

Di samping lokasi menjadi tempat melangsungkan suatu kegiatan, juga dapat menentukan atau mempengaruhi hal teknis yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, seperti pengangkutan bahan baku, permesinan dan perlengkapan lainnya, pemasaran dan lainnya. Semua itu menyangkut segi pembiayaan.

Malah lokasi timbul sebelum pendirian perusahaan dan juga setelah perusahaan bersangkutan berproduksi. Dapat saja suatu perusahaan yang sudah lama bergiat, mendadak harus pindah lokasi, karena misalnya perkembangan perusahaan, perubahan pasar atau sumber penawaran bahan bakunya (R. Soemita A.K., 1978:155).

Dengan demikian, dalam situasi persaingan yang melibatkan masalah biaya, maka penentuan lokasi industri menjadi faktor penting dan harus dipertimbangkan matang oleh para penanam modal.

Keadaan seperti itu sesuai dengan dasar teori lokasi perusahaan, yaitu "*tempatkanlah pada titik geografis yang terbanyak memberi kesempatan pada perusahaan dalam usaha mencapai tujuan*" (Soehardi Sigit, 1982:28).

Banyak faktor yang perlu ditelaah dalam menentukan lokasi industri. Berkenaan dengan studi tentang faktor lokasi industri, ada dua metode pendekatan yang dapat diterapkan (Paul Sihotang, 1977:117), yaitu:

1. Pendekatan teoritik;
2. Pendekatan empirik.

Pendekatan teoritik berusaha melakukan abstraksi dari realita, menyusun sistem ketentuan "*murni*" yang bersifat menyeluruh. Dalam hal ini, akan dicari suatu teori umum tentang lokasi industri yang terdapat pada saat tertentu serta perubahan struktur tersebut.

Pendekatan empirik berusaha mengumpulkan dan mencatat faktor yang mungkin penting, disertai contoh situasi yang menggambarkan, bahwa faktor bersangkutan memang penting bagi penentuan lokasi industri tertentu. Biasanya tidak diusahakan untuk

merumuskan faktor seperti itu menjadi suatu teori umum. Dengan demikian, pendekatan ini umumnya terbatas pada usaha memberi gambaran deskriptif.

Dalam TELAAH ini, penentuan faktor lokasi dilakukan melalui pendekatan empirik. Ada dua tahap yang dilakukan, yaitu:

1. Menentukan faktor umum yang mempengaruhi penentuan lokasi industri;
2. Menggali pendapat, persepsi maupun penilaian dari pengusaha industri terhadap faktor lokasi yang telah ditentukan (pada tahap pertama).

Dalam kaitan ini, faktor lokasi yang ditentukan tidak terbatas pada jenis industri tertentu, melainkan berlaku untuk semua jenis industri dan bersifat lebih umum. Pertimbangan utama dalam menjabarkan faktor lokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan perusahaan industri bersangkutan.

Secara keseluruhan, faktor umum yang ditetapkan dalam penentuan/pemilihan lokasi industri adalah:

1. Faktor input, meliputi bahan baku, tenaga kerja, energi, air, iklim dan lahan.
2. Faktor output, mencakup pasar atau konsumen dan fasilitas pembuangan.
3. Faktor penunjang langsung, terdiri atas perangkutan dan fasilitas komunikasi.
4. Faktor penunjang tidak langsung, berupa fasilitas perkotaan/lingkungan serta dorongan lokal.

#### **Penentuan Kriteria Penilaian**

Para penanam modal diharapkan dapat memberikan persepsi/pendapat terhadap ke 12 faktor lokasi umum tersebut di atas. Persepsi tersebut sedapat mungkin mencakup pengalaman masa lalu, kondisi faktual saat ini, serta perkiraan masa mendatang.

Persepsi penanam modal tersebut dimaksudkan pula untuk mengukur pengaruh faktor lokasi tersebut dalam menarik perusahaan industri ke suatu wilayah. Dengan pernyataan lain, para penanam modal akan memberikan penilaian berdasarkan persepsinya terhadap setiap faktor lokasi, berpedoman pada kriteria penilaian terumus.

Kriteria penilaian yang digunakan untuk menilai faktor lokasi adalah "kriteria tingkat kepentingan". Kriteria ini, diharapkan sudah mencakup atau memperhitungkan masalah biaya, persaingan, ketersediaan, kemudahan atau pun kesulitan, atau segala hal yang

dialami perusahaan industri dalam memperoleh faktor lokasi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, dalam melakukan penilaian digunakan sistem pembobotan, yaitu 100 (nilai tertinggi) untuk kondisi terbaik dan 0 (nilai terendah) untuk kondisi terburuk. Berdasarkan kisaran nilai ini, kriteria tingkat kepentingan diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, yaitu:

- sangat penting, nilai 81-100, kondisi terbaik,
- penting, nilai 61- 81,
- cukup penting, nilai 41- 60,
- kurang penting, nilai 21- 40,
- tidak penting, nilai 0 - 20, kondisi terburuk.

#### **Penentuan Sampel**

Untuk mengenali faktor lokasi industri yang didasarkan pada preferensi penanam modal di WP Botabek dan WP Bandung Raya, dibutuhkan data dan informasi dari penanam modal langsung.

Pengumpulan data untuk keperluan itu dilakukan dengan penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan) yang menyangkut ke 12 faktor lokasi umum beserta rinciannya. Penilaiannya, seperti telah dikemukakan pada uraian terdahulu, dilakukan dengan kriteria tingkat kepentingan.

Perusahaan industri yang menjadi responden adalah:

1. Perusahaan industri yang mendapat fasilitas PMA atau PMDN dari BKPM Pusat maupun BKPM Jawa Barat;
2. Perusahaan industri yang berlokasi di kedua WP yang diamati (Botabek dan Bandung Raya). Dalam menentukan sampel, digunakan prosedur gabungan berdasarkan prinsip "cluster sampling" dan "stratified sampling".

Agar lebih jelas, lihat Tabel 1 pada halaman berikut.

Perusahaan industri tersebut pada umumnya telah berproduksi sejak 1970 hingga 1982, sehingga jika pengumpulan data ini dilakukan pada akhir 1986, maka mereka telah bergiat minimal 5 tahun. Dengan demikian perusahaan bersangkutan telah berpengalaman dalam mengenal dan terlibat dalam sistem kegiatan ekonomi Jawa Barat, terutama dalam kaitan dengan perkembangan potensi kegiatan industri.

**TABEL 1**  
**UKURAN DAN SEBARAN PERUSAHAAN (SAMPEL)**  
**DI WP BOTABEK DAN BANDUNG RAYA**

WILAYAH	POPULASI Perusahaan Industri	JUMLAH SEKTOR			JUMLAH SAMPEL Perusahaan Industri
		TOTAL	PMA	PMDN	
WP BOTABEK :	407	54	40	48	88
Kodya Bogor	3	3	1	2	3
Kab. Bogor	171	21	14	19	33
Kab. Tangerang	145	16	11	15	26
Kab. Bekasi	88	14	14	12	26
WP BANDUNG RAYA :	247	34	10	30	40
Kodya Bandung	82	10	2	10	12
Kab. Bandung	153	15	5	13	18
Kab. Cianjur	1	1	-	1	1
Kab. Garut	3	3	-	3	3
Kab. Sumedang	8	5	3	3	6
<b>J U M L A H</b>	<b>654</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>128</b>

Sumber : Hasil pengolahan dari data perkembangan PMA dan PMDN di Jawa Barat, BKPM Propinsi Jawa Barat 1986,

### Karakteristik Penentuan Lokasi Industri

Untuk mengamati karakteristik penentuan lokasi industri, perlu diketahui pertimbangan utama yang mendasarinya. Ada 5 pertimbangan utama yang dapat dikenali (R. Soemita A.K., 1978:162-164), yaitu:

1. Pertimbangan ekonomis, terutama menyangkut masalah biaya untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan pengeluaran minimal,
2. Lokasi historis, seperti tanah adat, tanah warisan, tanah kosong yang telah lama dimiliki sebelum perusahaan berdiri, kegiatan usaha masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun.
3. Lokasi yang ditunjuk atau ditentukan pemerintah, karena alasan politis, strategis, keamanan maupun kepentingan perencanaan.
4. Lokasi yang ditentukan secara spekulasi atau tanpa memperhitungkan faktor penting yang mempengaruhi suatu lokasi industri.
5. Jenis industri yang "footlose", yaitu dapat berlokasi di sembarang tempat. Industri ini tidak bergantung pada faktor lokasi.

Dari seluruh sampel yang berjumlah 128 perusahaan industri, sebanyak 96,09% menentukan lokasi industri berdasarkan pertimbangan ekonomis yang menitik -

beratkan pada keuntungan maksimal. Pertimbangan lain, seperti lokasi yang ditentukan pemerintah, lokasi yang ditentukan secara spekulatif dan jenis industri "footlose" hanya dipilih oleh sekitar 3,9% industri saja. Sementara tidak satu pun perusahaan yang penentuan lokasinya didasarkan pada lokasi historis.

Setelah menilik pertimbangan utama dalam penentuan lokasi industri, selanjutnya ditinjau faktor lokasi umum yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi industri berdasarkan persepsi dan penilaian para pengusaha.

Secara keseluruhan, faktor lokasi umum yang "sangat dipertimbangkan" dalam penentuan lokasi industri adalah faktor tenaga kerja, perangkutan dan fasilitas komunikasi yang dipilih masing-masing oleh 80,5%, 98,4% dan 82,9% perusahaan industri. Sementara faktor lokasi yang "lebih dipertimbangkan" adalah faktor bahan baku (63,4% dan air (68,3%).

Faktor lokasi yang "cukup dipertimbangkan" meliputi energi (51,2%), lahan (40,7%), pasar/konsumen (50,4%) dan fasilitas pembuangan (50,4%). Faktor lokasi yang "kurang dipertimbangkan" adalah fasilitas perkotaan (28,5%) dan dorongan lokal (36,6%). Hanya faktor iklim yang "tidak dipertimbangkan" oleh para pengusaha industri.

**TABEL 2**  
**FAKTOR-FAKTOR LOKASI POKOK YANG DIPERTIMBANGKAN**  
**DALAM PENENTUAN LOKASI INDUSTRI**  
**DI WP BOTABEK DAN WP BANDUNG RAYA**

FAKTOR-FAKTOR LOKASI POKOK	JUMLAH PERUSAHAAN				KLASIFIKASI
	Y - M	%	T - M	%	
A. Bahan Baku	78	63,4	45	36,6	LS
B. Tenaga Kerja	99	80,5	24	18,5	SD
C. Energi listrik, BBM dan Gas	63	51,2	60	48,8	CD
D. Air	84	68,3	39	31,7	LD
E. Iklim	3	2,4	120	97,6	TD
F. Areal Lahan / Tempat Kedudukan	50	40,7	73	59,3	CD
G. Pasar / Konsumen	62	50,4	61	49,6	CD
H. Fasilitas Pembuangan	62	50,4	61	49,6	CD
I. Transportasi	121	98,4	2	1,6	SD
J. Fasilitas Komunikasi	102	82,9	21	17,1	SD
K. Fasilitas Pertokoan / Lingkungan	35	28,5	88	71,5	KD
L. Dorongan Lokal	45	36,6	78	63,4	KD

Keterangan :

- Y - M = Yang Mempertimbangkan
- T - M = Tidak Mempertimbangkan
- SD = Sangat Dipertimbangkan
- LD = Lebih Dipertimbangkan
- CD = Cukup Dipertimbangkan
- KD = Kurang Dipertimbangkan
- TD = Tidak Dipertimbangkan

Sumber : Survei primer, tahun 1986/1987

### Beberapa Masukan

Pengamatan terhadap faktor lokasi di atas difokuskan pada wilayah yang mengalami konsentrasi kegiatan industri, yaitu WP Botabek dan WP Bandung Raya. Dengan demikian, hasil telaahan hanya dapat digunakan sebagai masukan bagi wilayah yang berkarakteristik lokasi relatif sama.

Berdasarkan paparan terdahulu, maka terdapat beberapa aspek yang patut dipertimbangkan, khususnya oleh BKPM, dalam merumuskan arahan bagi kegiatan penanaman modal, meliputi:

- a. Faktor lokasi yang berpengaruh terhadap penentuan lokasi industri/perusahaan;
- b. Faktor lokasi yang dibutuhkan industri;
- c. Kaitan faktor lokasi terhadap lokasi industri.

Selanjutnya, aspek tersebut dapat digunakan untuk masukan studi (dapat bersamaan dengan studi yang pernah dilakukan BKPM, seperti Studi Pendahuluan Penanaman Modal). Studi tersebut pada prinsipnya harus dapat memberi gambaran tentang faktor lokasi yang potensial. Hal tersebut sangat penting, terutama

untuk mendukung sektor potensial yang telah lebih dahulu diteliti.

Apabila kesimpulan studi di atas menunjukkan adanya faktor lokasi yang tidak potensial, maka hal ini merupakan masukan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mengubahnya menjadi faktor lokasi yang potensial. Misalnya saja dilakukan melalui pemberian subsidi atau swadaya masyarakat. \*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Partadiredja, Ace, **Perhitungan Pendapatan Nasional**, LP3ES, Jakarta, 1977
- Perloff, H.S. et al, **Regions, Resources and Economic Growth**, Univ. of Nebraska Press, 1960.
- Sigit, Soehardi, **Pengantar Ekonomi Perusahaan**, Armurita, Yogyakarta, 1982.
- Sihotang, Paul, **Pengantar Perencanaan Regional**, terjemahan, LP-FEUI, Jakarta, 1977.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian (ed), **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Soemita, R.A.K., **Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern**, Tarsito, Bandung, 1978.
- Sukirno, Sadono, **Ekonomi Pembangunan : Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan**, Penerbit Borta Gorat, Medan, 1981.